

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH OLAHAN MANGGA
(Studi pada Sentra Olahan Mangga
Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)**

Fathatur Rohmah, Tjahjanulin Domai, Sukanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail : fatharohmah@gmail.com

Abstract: *Local Government Strategy in the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Processed Mango (Study on Sentra Processed Mango Banjarsari Village Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo).* Development is a process that planned to change things for the better. The development process is done through empowerment of MSMEs. Local government strategy of Kabupaten Probolinggo in practice represented Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan is indispensable to increase capability of processor mango and increase the volume of MSMEs processed mango which is one of the superior products. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in terms of managerial effort, capital facilitation, market access expansion and support the ease of licensing. While Dinas Perindustrian dan Perdagangan is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in the manage mango and expansion of market access. Factors supporting of empowerment is financial support from the government and business consulting clinic, while inhibiting factors is the seasonal raw materials and the quality of human resources are lacking.

Keywords: *development, strategy, empowerment, MSMEs*

Abstrak: *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi Pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo).* Pembangunan merupakan proses terencana untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Proses pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang dalam pelaksanaannya diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengolah mangga dan meningkatkan volume UMKM olahan mangga yang merupakan salah satu produk unggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan DISPERINDAG merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelolah mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.

Kata kunci: *pembangunan, strategi, pemberdayaan, UMKM*

Pendahuluan

Menurut Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Suryono (2010, h.3) dikatakan bahwa “pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Pendekatan pembangunan yang dapat dilakukan sangat beragam, namun pendekatan ekonomi dirasa lebih menjadi pilihan utama saat ini. Pembangunan ekonomi ini

dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Mengingat UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penciptaan tenaga kerja dan sumber pendapatan khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah.

Terkait dengan pengembangan UMKM yang merupakan aktivitas ekonomi lokal yang

secara jelas merupakan salah satu urusan yang bersifat wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (c.13) "...i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; ". Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM di Provinsi Jawa Timur dan mempunyai *trackrecord* yang bagus dalam pengembangan sentra UMKM. Terbukti dengan penerimaan dua penghargaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh Bupati dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

UMKM di Kabupaten Probolinggo terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil, dan sebagainya. Banyaknya unit usaha yang terdapat di Kabupaten Probolinggo, sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi cukup besar. Berdasarkan diagram PDRB menurut jenis lapangan usaha pada tahun 2013, maka sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar sebanyak 30%, kontribusi terbesar kedua adalah pertanian sebanyak 29 % dan industri pengolahan 19%. Katalog yang dikeluarkan BPS jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 sebanyak 9.027 dan untuk tahun 2013 jumlah pekerja naik menjadi 10.196 pekerja dengan kata lain naik sebesar 12,95 %. Hal ini menunjukkan apabila sektor industri pengolahan ini dikelola dengan baik maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka.

Saat ini yang menjadi produk andalan UMKM Kabupaten Probolinggo adalah olahan mangga. Mengingat Kabupaten Probolinggo produksi mangga yang sangat melimpah dan untuk meningkatkan nilai tambah dari buah mangga ketika musim panen berlangsung. Salah satu cara pemberdayaan UMKM olahan mangga ini maka terbentuk Kelompok Usaha Bersama yang berada di Desa Banjarsari yang merupakan sentra olahan mangga. Olahan mangga yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Bersama ini meliputi sirup mangga, selai mangga, manisan mangga, dodol mangga. Akan tetapi, pada kenyataan eksistensi olahan mangga ini masih belum banyak dikenal orang dan masih belum terlihat peningkatan volume UMKM olahan mangga di Kabupaten Probolinggo. Sebaliknya pada kenyataannya olahan mangga merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Probolinggo. Berkaitan dengan hal ini untuk mempertahankan dan meningkatkan

UMKM khususnya pada unit usaha olahan mangga, maka diperlukan peran penting dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yaitu dengan cara pemberdayaan, dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk pemberdayaan UMKM olahan mangga ini diwakili oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan strategi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi dalam arti sempit seringkali diartikan sebagai keseluruhan proses pencatatan secara tertulis (proses catat mencatat). Sedangkan dalam arti luas menurut Siagian sebagaimana dikutip Pasolong (2014, h.3) mendefinisikan "administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya". Menurut Syamsi (1986, h.3) "pembangunan merupakan proses perubahan sistem yang direncanakan dan pertumbuhan menuju arah perbaikan yang berorientasi pada modernitas, *nation building*, dan kemajuan sosial-ekonomis". Menurut Tjokroamidjojo (1995, h.15) "Administrasi pembangunan adalah usaha untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dan merata dalam kegiatan produktif dan usaha-usaha pembangunan".

2. Strategi

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013, h.167-168) secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan. Salah satu pendekatan yang ada adalah "Strategi sebagai kegiatan, sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan perusahaan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan".

3. Pemerintah Daerah

Menurut Blakely sebagaimana dikutip Kuncoro (2004, h.113-114) terdapat beberapa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah sebagai koordinator, yaitu

Pemerintah daerah merencanakan, menetapkan dan mengusulkan suatu kebijakan atau dalam hal ini berhubungan dengan pembangunan daerah yang menjadi otonominya. Disisi lain, peran koordinator dalam pembangunan ekonomi daerahnya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan informasi ekonomi seperti lapangan kerja yang terbuka, angkatan kerja yang ada serta pengangguran. Serta dapat pula bermitra dengan swasta maupun lembaga-lembaga yang lain.

4. Pemberdayaan

Menurut widanti (2011, h.46) “pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta mengembangkannya. selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri”.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan di masa krisis UMKM masih mampu berdiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil yang ada apabila dikelola dengan baik, maka dapat menyerap banyak tenaga kerja. menurut Sjaifuddin sebagaimana dikutip Firmasnsyah (2014, h.43) strategi pemberdayaan UMKM antara lain sebagai berikut :

- (1) Strategi peningkatan kemampuan finansial
- (2) Pengembangan pemasaran
 - a. Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar
 - b. Proteksi pasar
- (3) Pengembangan sumberdaya manusia
- (4) Strategi pengaturan dan pengendalian
 - a. Pengaturan perijinan
 - b. Fungsi kelembagaan

Lebih lanjut menurut Noor dan Setyawati (2010, h.52) terdapat kelemahan Kinerja UMKM terkait dengan faktor-faktor :

- (1) Akses terhadap sumberdaya produktif yang masih lemah;
- (2) Spesifikasi produk masih kurang karena tingkat inovatif dan kreativitas rendah;
- (3) Kapasitas produksi terbatas karena kesulitan dalam modal, ketersediaan alat produksi berikut penguasaan teknologi, tenaga kerja yang kurang terampil, dan kesulitan bahan baku;
- (4) Kelengkapan dokumen karena kesulitan memenuhi persyaratan, biaya, birokrasi dan waktu yang lama; serta
- (5) Biaya kegiatan ekspor tinggi karena banyaknya pungutan yang tidak resmi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian ini melihat dan mengungkapkan fenomena serta permasalahan penerapan strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga kemudian mendeskripsikan berbagai permasalahan yang ada dalam penerapan strategi pemerintah daerah tersebut.

Fokus penelitian adalah 1) strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga yang dilihat dari pengembangan sumberdaya manusia, fasilitasi permodalan, memperluas akses pasar, perijinan 2) faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga 3) dampak pemberdayaan UMKM olahan mangga yang dilihat dari sumberdaya manusia, pendapatan, lapangan kerja.

Lokasi penelitian di Kabupaten Probolinggo dan situs penelitian pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta sentra olahan mangga di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. jenis data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan sumber data antara lain informan, dokumen dan peristiwa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, catatan lapangan serta pedoman wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model intrektif Miles, Huberman dan Saldana dengan prosedur yaitu kondesasi data, penyajian data kemudian menarik kesimpulan atau verifikasi.

Pembahasan

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Olahan Mangga

Strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk pemberdayaan UMKM olahan mangga ini diwakili oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan pelaksana teknis dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga.

Strategi pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM olahan manga antara lain yaitu :

- a) Pengembangan sumber daya manusia
- b) Fasilitasi permodalan
- c) Memperluas akses pasar
- d) Perijinan

Kedua dinas yang menerapkan strategi pemerintah daerah ini mempunyai tugas masing-masing. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan pelaksana strategi

pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam mengelolah mangga dan perluasan akses pasar.

Pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan adalah dengan pelatihan dalam mengelolah mangga dan manajemen usaha serta memagangkan UMKM ke luar daerah. Fasilitasi permodalan yang dilakukan untuk UMKM olahan mangga adalah pinjaman bank JATIM, disamping itu terdapat beberapa fasilitas lain yaitu melalui pemberian Kredit Modal Kerja, CSR. Strategi perluasan akses pasar yang dilakukan antara lain melalui event pameran tingkat lokal (pameran di Diva Mall Kraksaan) regional (pameran di Grand City Mall Surabaya) dan nasional (ajang SmashCo di Jakarta) media cetak (brosur, pamflet) maupun elektronik (acara Tupperware) serta penerapan peraturan syarat pendirian usaha mini market harus ada lima produk UMKM lokal. Sedangkan dalam hal perijinan, Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prosedur perijinan sangat dipermudah. UMKM olahan mangga yang ada hanya menyediakan berkas-berkas yang dibutuhkan sedangkan untuk biaya pengurusan ijin tidak ada atau gratis. Penerbitan izin SIUP dan TDP dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP) dan penerbitan nomor PIRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah hanya sebagai fasilitator yang membantu menguruskan izin.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM Olahan Mangga

Faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga antara lain adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis untuk UMKM. Dana dari pemerintah ini melalui dana APBD untuk setiap program yang dijalankan. Akan tetapi yang dimaksud dana dari pemerintah ini dalam realisasinya bukan berupa uang untuk usaha olahan mangga tapi hibah dalam bentuk pemberian pelatihan dan sarana dalam promosi. Klinik Konsultasi Bisnis untuk UMKM memberikan tujuh pelayanan, antara lain adalah advokasi, konsultasi bisnis, informasi bisnis, diklat UMKM, akses pembiayaan, akses pemasaran, akses perkeroperasian. Sedangkan

Faktor penghambat antara lain adalah bahan baku dan kualitas sumber daya manusia. ketersediaan bahan baku merupakan salah satu faktor penghambat. Bahan baku yang merupakan buah musiman sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu untuk permasalahan kurangnya bahan baku pada saat musim mangga berakhir maka UMKM olahan mangga ini membeli di luar kabupaten Probolinggo dan juga bekerjasama dengan kantor-kantor penelitian mangga. sedangkan kualitas sumber daya manusia yang ada masih kurang. Jiwa *entrepreneur* yang dimiliki oleh para pengolah mangga ini sudah sangat baik akan tetapi pemahan untuk diversifikasi olahan mangga masih kurang dan kurang memahami tentang kualitas produk seperti pengemasan produk yang masih kurang menarik. Pengelolah masih belum memiliki daya dalam berinovasi.

3. Dampak Pemberdayaan UMKM Olahan Mangga

Dampak pemberdayaan UMKM olahan mangga dalam penelitian ini dilihat dari sumber daya manusia, pendapatan, lapangan kerja Pengolah mangga yang ada mempunyai latar belakang pendidikan dari mulai tidak sekolah, lulusan SD sampai SMP..

Sumber daya manusia yang ada mempunyai keterampilan mengelolah mangga akan tetapi masih kurang dalam kemampuan diversifikasi produk, terbukti sejak tahun 2008 sampai sekarang para pengelolah masih memproduksi empat produk turunan mangga yaitu sirup mangga, dodol mangga, selai mangga, manisan mangga serta kurang kemampuan dalam pengemasan.

Dampak lain dari pemberdayaan ini adalah peningkatan pendapatan dari masyarakat. Masyarakat yang khususnya pengolah mangga mayoritas adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sebelumnya, dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah daerah ini bisa mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi, pendapatan yang diperoleh para pengolah mangga atau anggota KUB masih tergantung pada jumlah penjualan produk olahan mangga.

Kemudian dampak terhadap penciptaan tenaga kerja, dengan adanya UMKM olahan mangga ini yang terbentuk dalam Kelompok usaha bersama ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, yang awalnya hanya beranggotakan 2 orang kemudian sekarang sudah menjadi 27 anggota. Kelompok usaha bersama ini bukan terdiri dari beberapa pemilik unit usaha tetapi para pekerja dari satu unit usaha.

Kesimpulan

Strategi pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain adalah pengembangan sumberdaya manusia, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar, kemudahan dalam perijinan. Faktor pendukung

dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis untuk UMKM, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, Robby. (2014) **Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)**. Skripsi tidak diterbitkan. Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Kuncoro, Mudrajat (2004) **Otonomi & pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang**. Jakarta, Erlangga.
- Mardikanto, Totok., dan Soebiato, Poerwoko. (2013) **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi**. Bandung, Alfabeta
- Noor, Ida R., Setyawati, Lugina. (2010) **Pemberdayaan UKM: Catatan Refleksi Hasil Meta Riset**. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, Januari 2010 : 39-58. Jakarta, Labsosio FISIP-UI
- Pasolong, Harbani. (2014) **Teori administrasi publik**. Bandung, Alfabeta.
- Suryono, Agus. (2010) **Dimensi- Dimensi Prima Teori Pembangunan**. Malang, UB PRESS.
- Syamsi, Ibnu. (1986) **Buku Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional**. Jakarta, CV. Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995) **Perencanaan Pembangunan**. Jakarta, PT Toko Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**[Internet]. Available from: <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/32Tahun2004UU.HTML>>[Accessed 11th January 2015].
- Widanti, Putu T. (2011) **Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali**. Denpasar, Jagat Press.